

2022



PPID

KABUPATEN SERANG

**LAPORAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2021**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN SERANG
JL. RAYA JAKARTA KM.4 PAKUPATAN SERANG – BANTEN (PPID.SERANGKAB.GO.ID)**

DAFTAR ISI

I.	Latar Belakang.....	1
II.	Dasar Hukum.....	3
III.	Maksud Dan Tujuan.....	4
IV.	Sarana Dan Prasarana Pelayanan	4
	A. Kedudukan Sekretariat	
	B. Ruang Sekretariat	
	C. Fasilitas Pelayanan	
V.	Standar Operasional Pelayanan	6
	A. Sistem Pelayanan	
	B. Pelaksanaan Layanan Informasi	
	C. Alur Pelayanan	
	D. Jam Pelayanan	
	E. Kebijakan Layanan	
VI.	Kendala Pelayanan.....	8
VII.	Rekomendasi dan Rencana.....	9
VIII.	Rincian Pelayanan dan Penyelesaian Sengketa.....	10
IX.	Daftar PPID Pembantu.....	11

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, adalah merupakan Undang-Undang yang di latarbelakangi oleh bergulirnya peristiwa reformasi di Indonesia sejak Tahun 1998 yang menjadi titik tolak perubahan paradigma tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governmance) yaitu terwujudnya pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabilitas serta adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan Kebijakan Publik.

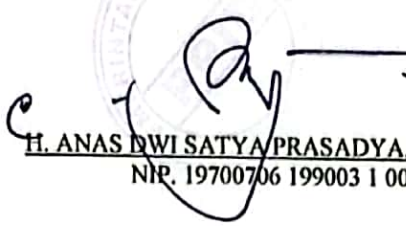
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini di tujukan untuk meningkatkan kemampuan Badan Publik dalam memberikan Pelayanan Informasi kepada masyarakat dan juga untuk mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini juga memberikan penegasan bahwa keterbukaan Informasi Publik bukan saja merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal, namun juga merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana tercantum pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keterbukaan informasi publik bagi Badan Publik menjadi semakin penting untuk dilaksanakan dalam era globalisasi, karena sudah tidak ada lagi ruang dan sekat yang membatasi masyarakat untuk memperoleh informasi yang seluas-luasnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu Badan Publik Kabupaten Serang membuka diri untuk dapat mempublikasikan Informasi terkait dengan perumusan kebijakan program dan kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan. Demikian juga Informasi yang disampaikan masyarakat menjadi masukan bagi badan Publik dalam proses perumusan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga tercipta komunikasi dua arah antara Pemerintah dan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tersebut Pemerintah Kabupaten Serang telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Nomor. 042/kep.605-Hub.org/20013, tentang Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.

Oleh karena itu melalui kesempatan ini , kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dalam penyusunan panduan ini dan mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Kabupaten Serang.

K. KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN
DAN STATISTIK KAB. SERANG SELAKU PPID UTAMA
KABUPATEN SERANG


H. ANAS DWI SATYA PRADYA, S.Sos, M.Si.
NIP. 19700706 199003 1 002

I. Latar Belakang

Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin setiap orang untuk memperoleh informasi. Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi setiap orang sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Lahirnya UU Nomor 14 tahun 2008 menjadi landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi, dan (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, mudah dan murah.

Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 di Kabupaten Serang berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor : 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Serang. Peraturan ini bertujuan untuk (1) sebagai pedoman dalam pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah, (2) menjamin tertib administrasi, efektif, efisien, dan akuntabel dalam pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di Kabupaten Serang sebagai wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di wilayah Pemerintah Kabupaten Serang diharapkan menjadi motivasi bagi semua badan publik di Kabupaten Serang untuk menjalankan kewajibannya dalam penyediaan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).



II. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843).
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 31 Tahun 2013, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
8. Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2020, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang

III. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Menjalankan wewenang dan tanggung jawab yang telah diamanatkan Undang - undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tujuan :

Mendorong pelaksanaan Undang-Undang tersebut secara efektif dan akuntabel dalam meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang untuk menghasilkan layanan informasi yang mudah, murah, cepat, tepat dan bertanggung jawab.

IV. Sarana Dan Prasarana Pelayanan



PPID KABUPATEN SERANG. | ppid.serangkab.go.id

A. Kedudukan Sekretariat

- a. PPID Kabupaten Serang berkedudukan di DiskominfoSatik kabupaten Serang JL.Raya Veteran no 1 Serang, yang ditetapkan dengan peraturan Bupati No. 24 Tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang pada Bidang Komunikasi Informasi Publik bagian Seksi Pelayanan Informasi Publik.
- b. Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) adalah Kepala DiskominfoSatik sebagai PPID Utama.

B. Ruang Sekretariat

Ruang dengan ukuran 4 x 6 meter ini juga merupakan ruang Bidang Komunikasi Informasi Publik pada DiskominfoSatik Kabupaten Serang.

C. Fasilitas Pelayanan

Fasilitas yang tersedia

- Petugas Pelayanan : Terdiri dari 2 orang, PNS
- Komputer : Terdiri dari 2 unit
- Formulir Informasi Publik.
- Formulir Keberatan Informasi Publik
- Buku Register surat Masuk PPID
- Buku Register surat keluar PPID
- Buku Register surat Keberatan Informasi Publik
- Meja dan kursi layanan informasi



V. Standar Operasional Pelayanan

A. Sistem Pelayanan

PPID Kabupaten Serang memberikan Pelayanan Informasi Publik setiap hari kerja di sekretariat PPID Kabupaten Serang dalam hal ini Aplikasi telematika dan pengelolaan informasi publik, namun dapat juga dilakukan langsung oleh pemohon, permohonan Informasi kepada SKPD yang bersangkutan melalui PPID-Pembantu pada masing-masing SKPD yang dalam hal ini dijabat oleh Sekretaris Dinas pada SKPD, Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan dan Bagian Tata Usaha pada Instansi/Kantor tertentu.

System Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Serang dapat di akses melalui website : serangkab.go.id dan ppid.serangkab.go.id.

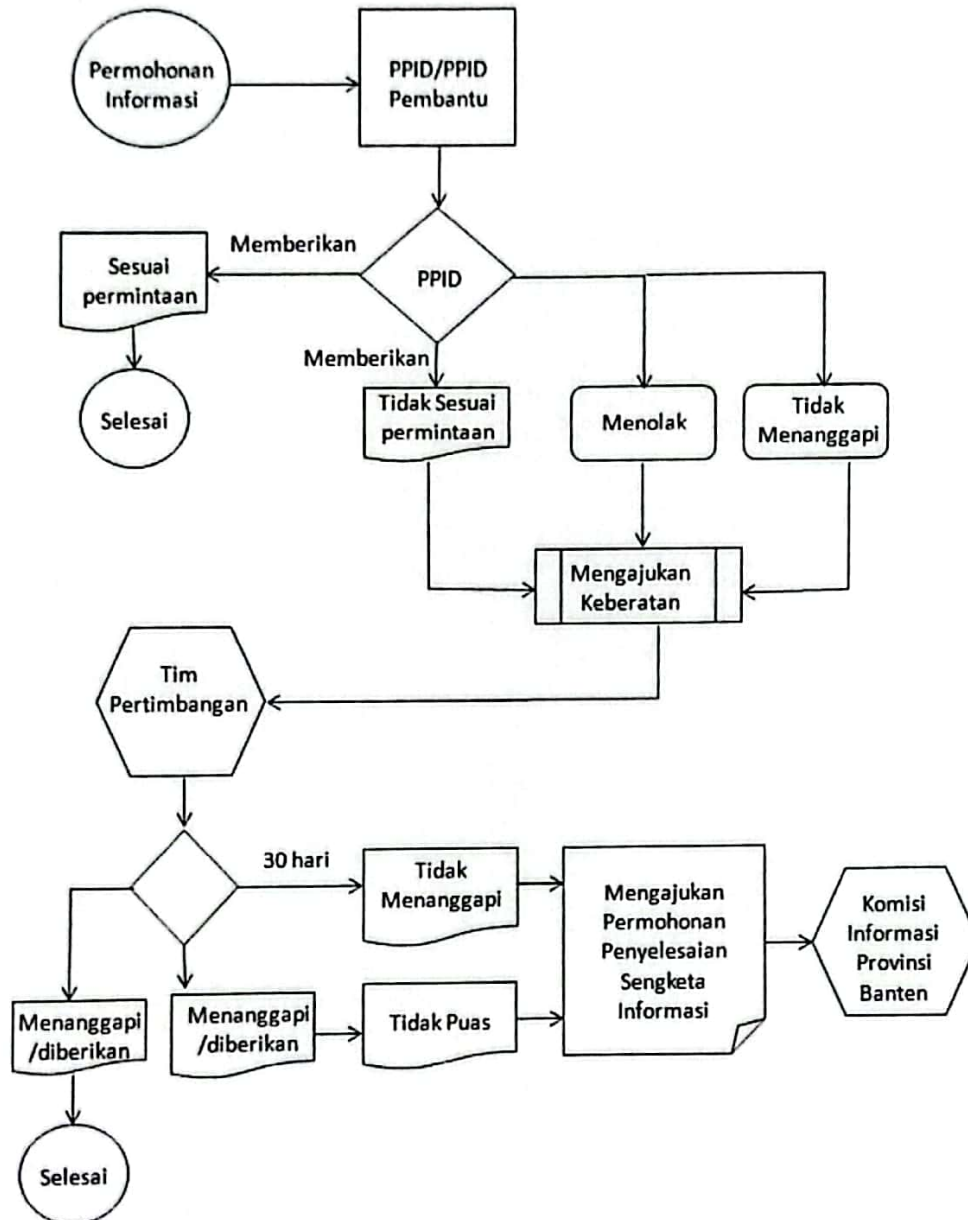
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik (slip perki pasal 56 ayat 1 dan 2 point b)

1. Pemohon Informasi dapat mengajukan Permohonan Informasi Publik ke Sekretariat PPID Kabupaten Serang pada Dinas Kominfo Kabupaten Serang) atau langsung ke SKPD melalui PPID-Pembantu SKPD;
2. Pemohon Informasi datang mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon/pengguna informasi;
3. Pelaksana Teknis dan Administrasi mendaftarkan Permohonan Informasi dan memberikan tanda bukti terima Permohonan Informasi Publik kepada pemohon setelah persyaratan pemohon dianggap lengkap;
4. Pelaksana Teknis dan Administrasi menyampaikan permohonan informasi kepada Verifikator PPID (Kasi Data Statistik);
5. Verifikator PPID setelah melakukan verifikasi atas Permohonan Informasi kemudian menyerahkan Permohonan Informasi kepada Penanggung Jawab Sekretariat PPID (Kasi Pelayanan Informasi Publik);
6. Penanggung Jawab Sekretariat PPID memutuskan boleh tidaknya Permohonan Informasi diberikan. Hasil keputusan disampaikan kepada PPID Utama (Kabid Komunikasi Informasi Publik) untuk berkirim surat kepada Pemohon Informasi atas hasil jawaban dari Permohonan Informasi;
7. Dalam hal informasi yang diminta berada dalam penguasaan PPID, maka PPID dapat memberikan secara langsung kepada pemohon informasi;



8. Dalam hal Informasi yang diminta berada diluar penguasaan PPID, maka PPID meminta kepada PPID pembantu untuk mmeberikan data yang diminta kepada PPID untuk diolah lebih lanjut.

C. Alur Pelayanan



D. Jam pelayanan

Dalam memberikan Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Serang menetapkan waktu pelayanan Informasi yang dilaksanakan setiap hari kerja. Senin s/d Jumat.

- Senin-Kamis : 08.00 WIB – 15.00 WIB
Istirahat : 12.00 WIB – 13.00 WIB
- Jumat : 08.00 WIB – 15.00 WIB
Istirahat : 11.00 WIB – 13.00 WIB

E. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik (slip perki pasal 56 ayat 1 dan 2 point a)

Pelayanan Informasi Publik telah di atur dalam Perbup 108 Tahun 2020 utamanya pasal 23 yang berbunyi : Jabatan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 melekat kepada jabatan:

- a. Sekretaris pada setiap Perangkat Daerah;
- b. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda;
- c. Kepala Bagian Umum pada DPRD;
- d. Kepala Bagian Umum pada RSUD dr. Drajat Prawiranegara;
- e. Sekretaris Kecamatan;
- f. Kepala UPT di lingkungan Pemerintah Daerah.

PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi.

Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e, dan Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Ada tugas PPID Pembantu sudah di atur dalam Perbup 108 Tahun 2020 Pasal 24 dan 25.

PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mempunyai tugas:



- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- f. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk masyarakat;
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID;
- h. Melakukan pemisahan surat masuk yang bersifat kedinasan dan surat permohonan informasi publik;
- i. Menerima permohonan informasi publik dari pemohon informasi;
- j. Melakukan register permohonan informasi publik;
- k. Menyampaikan surat permohonan informasi publik yang telah diregister untuk ditindaklanjuti kepada ppid dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

PPID-Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 selain melaksanakan tugas juga melaksanakan fungsi:

- a. Penghimpunan dan pengkoordinasian informasi publik di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat tugasnya;
- b. Penataan dan penyimpangan informasi publik di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat tugasnya.



VI. Kendala Eksternal dan Internal (slip perki pasal 56 ayat 1 dan 2 poin e)

Sekretariat PPID Kabupaten Serang menyadari penuh minimnya Sumber Daya Manusia menyebabkan beratnya beban kerja masing masing personel pada sekretariat PPID Kabupaten Serang sehingga perlu adanya penambahan personel.

VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut (slip perki pasal 56 ayat 1 dan 2 poin f)

- a. Peningkatan sumber daya manusia dengan adanya pelatihan pelatihan khusus;
- b. Perlunya penambahan anggaran kegiatan pelayanan informasi public;
- c. Perlunya adanya pembaharuan computer dan jaringan;
- d. Penerapan SOP yang tepat;
- e. Perlunya diperbanyak alat alat peraga (Poster dan dll) untuk meningkatkan tingkat ketahuan masyarakat akan adanya pelayanan informasi public.



VIII. Rincian Pelayanan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (slip perki pasal 56 ayat 1 dan 2 point c & d)

BULAN	PEMOHON INFORMASI	PERMINTAAN INFORMASI	STATUS			KEBERATAN INFORMASI	PROSES AJUDIKASI	KETERANGAN
			DIPENUHI	DITOLAK	DIPROSES			
JANUARI	4	11	2	2	-	-	-	Alasan penolakan karena syarat-syarat pemohon tidak lengkap
FEBRUARI	4	15	2	2	-	-	-	Alasan penolakan karena syarat-syarat pemohon tidak lengkap
MARET	7	69	5	2	-	-	-	Alasan penolakan karena syarat-syarat pemohon tidak lengkap
APRIL	1	1	-	1	-	-	-	Alasan penolakan karena syarat-syarat pemohon tidak lengkap
MEI	5	8	7	1	-	4	-	Alasan penolakan karena syarat-syarat pemohon tidak lengkap
JUNI	1	1	-	1	-	-	-	Alasan penolakan karena syarat-syarat pemohon tidak lengkap
JULI	3	6	1	5	-	-	-	Alasan penolakan karena syarat-syarat pemohon tidak lengkap
AGUSTUS	4	6	2	4	-	-	-	Alasan penolakan karena syarat-syarat pemohon tidak lengkap
SEPTEMBER	2	5	3	2	-	-	-	Alasan penolakan karena syarat-syarat pemohon tidak lengkap



NOVEMBER	6	26	21	5	-	1	-	Alasan penolakan karena syarat-syarat pemohon tidak lengkap
DESEMBER	10	15	8	7	-	-	-	Alasan penolakan karena syarat-syarat pemohon tidak lengkap
JUMLAH	49	178	60	40	-	5	-	-

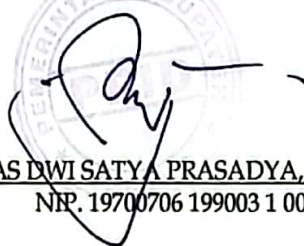
- Rata – Rata Waktu Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik adalah 10 Hari Kerja atau 17 Hari kerja apabila memerlukan waktu tambahan 7 Hari Kerja

IX. Daftar PPID Pembantu

(Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 108 Tahun 2020 Pasal 21)

- a. Sekretaris pada setiap Perangkat Daerah;
- b. Kepala Bagian Umum pada DPRD;
- c. Kepala Bagian Umum pada RSUD dr. Drajat Prawiranegara;
- d. Sekretaris Kecamatan;
- e. Sekretaris KORPRI;
- f. Kepala UPT di lingkungan Pemerintah Daerah.

P
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN
DAN STATISTIK KAB. SERANG SELAKU PPID UTAMA
KABUPATEN SERANG

a

H. ANAS DWI SATYA PRADYA, S.Sos., M.Si.
NIP. 19700706 199003 1 002

